Pengaruh Akuntabilitas Dan Tranparansi Informasi Publik Layanan Pemerintahan Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Kelurahan Kasemen

The Influence of Accountability and Transparency of Public Information on Government Services on Public Trust in Kasemen Subdistrict

Muhammad Zamzam Baihaqi[1], Maha Najwa[1] Fadhlullah Akhsan Daffa[1], Rani Rahmawati[1], Ayunurinda Pratiwi[1] Anisa Fitri[1]

[1]Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Vol.02, No. 01
Hal: 60 - 74
Diterbitkan : Juni 2026

Korespondensi
E-mail: zamzambaihaqi11@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana akuntabilitas yang dijalankan pemerintah kelurahan serta keterbukaan informasi publik berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Kelurahan Kasemen, Kota Serang. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif, karena fokus utamanya tidak hanya menggambarkan kondisi, tetapi juga menjelaskan hubungan antarvariabel. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang dipilih secara purposive, yakni masyarakat yang dinilai relevan dengan tujuan penelitian. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator akuntabilitas, transparansi informasi publik, dan kepercayaan masyarakat, dengan menggunakan skala Likert empat tingkat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling berbasis *Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintahan kelurahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, transparansi informasi publik juga terbukti berpengaruh positif dan bahkan menunjukkan pengaruh yang lebih kuat dibandingkan akuntabilitas. Secara bersama-sama, kedua variabel tersebut mampu menjelaskan 59,1% variasi kepercayaan masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepercayaan publik tidak dapat dibangun secara parsial, melainkan membutuhkan keseimbangan antara pertanggungjawaban yang jelas dan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, pemerintah kelurahan disarankan untuk terus memperkuat praktik akuntabilitas dan transparansi guna menciptakan pemerintahan yang dipercaya, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pemerintahan, Transparansi Informasi Publik, Kepercayaan Masyarakat, Pemerintahan Kelurahan

A b s t r a c t

This study seeks to explore how accountability in subdistrict governance and the transparency of public information influence public trust in Kasemen Subdistrict, Serang City. Rather than merely describing existing conditions, the research is designed to explain the relationships between these variables through a quantitative, explanatory approach. Data were collected by distributing questionnaires to 100 respondents selected using purposive sampling, focusing on community members considered relevant to the research objectives. The research instrument was developed based on indicators

of governmental accountability, public information transparency, and public trust, measured using a four-point Likert scale. The collected data were then analyzed using the Structural Equation Modeling approach with Partial Least Square (SEM-PLS), supported by the SmartPLS software. The findings indicate that accountability practiced by the subdistrict government has a positive and significant effect on public trust. At the same time, transparency of public information also shows a positive and significant influence, with a stronger impact compared to accountability. When examined simultaneously, both variables are able to explain 59.1% of the variation in public trust. These results suggest that public trust cannot be built through a single aspect alone, but requires a balanced implementation of clear accountability and open access to information. Therefore, this study recommends that subdistrict governments continue to strengthen accountability mechanisms and improve information transparency to foster credible, participatory, and community-oriented governance.

Keywords: *Government Accountability, Public Information Transparency, Public Trust, Subdistrict Government*

Pendahuluan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua fondasi utama dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks pemerintahan daerah, kedua prinsip ini berperan penting sebagai sarana untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga dan aparatur pemerintahan. Transparansi menunjukkan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat, sementara akuntabilitas menekankan pentingnya pertanggungjawaban yang jelas atas setiap kebijakan dan tindakan publik. Beberapa penelitian mutakhir menegaskan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas yang konsisten mampu memperkuat rasa keadilan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan (Rizki & Rahmawati, 2023) (Sulastri, N., Kurniawan, T., & Lestari, 2021).

Pada tingkat kelurahan, penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pemerintah lokal dianggap kredibel dan berintegritas. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang merasa akses terhadap informasi publik belum berjalan secara maksimal, termasuk di wilayah Kelurahan Kasemen, Kota Serang. Padahal, keterbukaan informasi publik merupakan elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan. Hasil penelitian (Suhardi et al., 2023) menunjukkan bahwa transparansi informasi publik berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Sementara itu, temuan (Judijanto, L., 2024) juga memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa transparansi administrasi publik mampu menumbuhkan persepsi positif warga terhadap kinerja pemerintah melalui peningkatan kontrol sosial dan partisipasi publik dalam proses kebijakan.

Selain transparansi, akuntabilitas juga menjadi unsur kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat. Pemerintah yang secara terbuka dapat mempertanggungjawabkan kebijakan, penggunaan

anggaran, serta hasil kinerjanya akan lebih mudah memperoleh legitimasi sosial dari warga. Sebaliknya, ketika akuntabilitas lemah, muncul persepsi negatif yang dapat menimbulkan kecurigaan terhadap praktik korupsi dan menurunkan tingkat partisipasi publik. (Fitrah, A., Aminah, S., & Rahayu, 2021) menegaskan bahwa lemahnya sistem akuntabilitas kinerja berdampak langsung pada berkurangnya kepercayaan masyarakat serta efektivitas pelayanan publik di tingkat pemerintahan lokal. Oleh karena itu, membangun sistem akuntabilitas yang terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil menjadi keharusan bagi setiap perangkat kelurahan agar kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus terjaga. Keterbukaan dan rasa tanggung jawab pemerintah desa terhadap warganya, yang menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan desa (Sofyani & Tahar, 2021b).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh akuntabilitas dan transparansi informasi publik terhadap kepercayaan masyarakat di Kelurahan Kasemen. Melalui pendekatan kuantitatif, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai hubungan kedua variabel tersebut dan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat hubungan sosial antara pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pilihan terhadap pendekatan kuantitatif didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk mengukur hubungan serta pengaruh antarvariabel secara jelas dan terukur melalui data numerik. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari responden melalui kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan yang disusun berdasarkan indikator variabel penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung yang relevan, seperti buku akademik, jurnal ilmiah nasional, penelitian sebelumnya, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi pemerintah. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat dasar teori dan memberikan konteks empiris yang membantu menganalisis temuan penelitian secara lebih komprehensif.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup yang disusun dengan skala Likert empat pilihan jawaban, yakni Sangat Setuju (poin 4), Setuju (poin 3), Tidak Setuju (poin 2), dan Sangat Tidak Setuju (poin 1). Skala ini dipilih dengan pertimbangan agar responden tidak berada pada posisi netral, sehingga mereka didorong untuk menunjukkan sikap yang lebih jelas terhadap setiap pernyataan yang diajukan. Dengan cara ini, penilaian yang diberikan diharapkan bisa mencerminkan pandangan responden secara lebih tegas dan jujur. Kuesioner tersebut dirancang untuk mengukur tiga

variabel utama dalam penelitian, yaitu Akuntabilitas dan Transparansi Informasi Publik sebagai variabel bebas, serta kepercayaan Masyarakat sebagai variabel terikat. Setiap butir pernyataan disusun mengacu pada indikator dari masing-masing variabel dan disesuaikan dengan kondisi serta praktik pelayanan pemerintahan di tingkat kelurahan. Setiap pernyataan dalam kuesioner disusun berdasarkan indikator variabel akuntabilitas, transparansi informasi publik, dan kepercayaan masyarakat yang diadopsi dari penelitian (Sofyani & Tahar, 2021).

Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian

Variable	Indikator	Pertanyaan Kuisioner
Akuntabilitas Pemerintah Desa (AP)	1. Pelaporan informasi penggunaan dana desa.	Pemerintah desa secara terbuka melaporkan informasi perolehan dan penggunaan dana desa (APBDes).
	2. Pelaporan kegiatan desa secara berkala	Pemerintah desa secara rutin menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat.
	3. Pelaporan hasil kegiatan	Pemerintah desa menyampaikan laporan hasil kegiatan secara terbuka kepada masyarakat.
	4. Pelaporan prestasi desa	Pemerintah desa menyampaikan pencapaian dan prestasi desa secara terbuka kepada masyarakat.
Tranparansi Informasi Publik (TIP)	1. Transaksi keuangan desa disertai bukti sah	Pemerintah desa selalu melampirkan bukti sah pada setiap transaksi keuangan desa.
	2. Laporan keuangan sesuai standar aturan	Format laporan keuangan desa mengikuti standar yang telah ditetapkan.
	3. Laporan keuangan lengkap	Laporan keuangan pemerintah desa disusun secara lengkap dan mudah dipahami.
	4. Laporan keuangan tepat waktu	Pemerintah desa selalu menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu.
	5. Kegiatan sesuai APBDes	Seluruh kegiatan pemerintah desa sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan.
Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Desa (KM)	1. Pemerintah bekerja secara amanah	Saya percaya pemerintah desa menjalankan tugas dengan jujur dan amanah.
	2. Pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat	Saya yakin pemerintah desa bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
	3. Partisipasi masyarakat	Saya bersedia berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa.
	4. Kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah desa	Saya mematuhi kebijakan dan himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Secara administratif, Kelurahan Kasemen memang merupakan bagian dari Kecamatan Kasemen. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang dalam publikasi Kecamatan Kasemen Dalam Angka 2024, jumlah penduduk Kecamatan Kasemen tercatat mencapai 96.838 jiwa. Data inilah yang dijadikan acuan populasi penelitian, mengingat hingga saat penelitian dilakukan, data kependudukan terbaru yang tersedia secara terbuka dan terverifikasi masih berada pada tingkat kecamatan, sementara data rinci di tingkat kelurahan belum dipublikasikan(Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2024).

Masyarakat dipilih sebagai populasi penelitian karena mereka merupakan pihak yang secara langsung berinteraksi dengan pemerintah kelurahan dan merasakan dampak praktik akuntabilitas serta transparansi informasi publik dalam pelayanan pemerintahan. Dengan kata lain, persepsi masyarakat

menjadi sumber informasi yang relevan dan penting untuk mengukur tingkat kepercayaan terhadap pemerintah kelurahan (OECD, 2018; UNDP, 2016). Karena jumlah populasi cukup besar dan terdapat keterbatasan waktu, tenaga, serta biaya penelitian, maka tidak memungkinkan seluruh anggota populasi dilibatkan sebagai responden. Untuk itu, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel agar data yang diperoleh tetap representatif. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 10 persen, yang masih dianggap wajar dalam penelitian sosial (Israel, 1992; Umar, 2013).

Rumus Slovin yang digunakan adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n: Ukuran sampel

N: Ukuran poulasi

e: Persen kelonggaran ketidaktelitan karena kesalahan pengambilan sample yang masih diinginkan (margin of error).

Diketahui:

N = 96.838

e = 0,10

$$n = \frac{96.838}{1 + 96.838(0.10)^2}$$

$$n = \frac{96.838}{1 + 96.838(0.01)}$$

$$n = \frac{96.838}{1 + 968.38}$$

$$n = \frac{96.838}{969.38}$$

$$n = \mathbf{99.89} \approx \mathbf{100} \text{ responden}$$

Hasil perhitungan kemudian dibulatkan menjadi 100 responden. Angka ini dianggap cukup memadai untuk keperluan analisis kuantitatif sekaligus mampu mewakili populasi penelitian secara proporsional. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria tersebut mencakup: (1) berdomisili di wilayah Kelurahan Kasemen; (2) pernah berinteraksi atau menerima layanan dari pemerintah kelurahan; dan (3) memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai informasi publik serta penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kelurahan.

Penetapan kriteria ini dimaksudkan agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan pengalaman nyata serta persepsi masyarakat yang sesuai dengan fokus variabel penelitian.

Dengan demikian, jumlah sampel sebanyak 100 responden, yang ditentukan melalui rumus Slovin dan diseleksi berdasarkan purposive sampling, dipandang cukup representatif. Sampel ini diyakini mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi informasi publik terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Kelurahan Kasemen. Penelitian ini menggunakan metode Simple Random Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dari seluruh populasi tanpa membaginya ke dalam kelompok atau strata tertentu. Metode ini dikategorikan sebagai probability sampling karena setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai responden.

Dengan teknik ini, setiap masyarakat di Kelurahan Kasemen memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari sampel, sehingga hasil penelitian diharapkan mencerminkan pandangan dan pemahaman masyarakat dan instansi terkait pengaruh akuntabilitas dan tranparansi informasi publik layanan pemerintahan terhadap kepercayaan masyarakat di kelurahan kbasemen secara proporsional. Penggunaan Simple Random Sampling juga mempermudah proses pengambilan sampel dan menjaga validitas serta generalisasi temuan penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Metode yang diterapkan adalah Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS). Metode ini dipilih karena fleksibel dalam mengolah data, terutama dengan jumlah sampel yang relatif terbatas, serta tidak terlalu menuntut asumsi distribusi normal.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Data Responden

Pendeskripsian karakteristik responden merupakan langkah penting dalam penelitian kuantitatif karena berfungsi untuk menjelaskan latar belakang subjek penelitian serta memperkuat validitas hasil analisis (Sugiyono, 2019). Penyajian data karakteristik responden dilakukan melalui diagram lingkaran (pie chart) agar lebih mudah dipahami. Penggunaan visualisasi data dalam bentuk grafik dinilai efektif untuk meningkatkan pemahaman pembaca terhadap distribusi data penelitian (Ghozali, 2018).

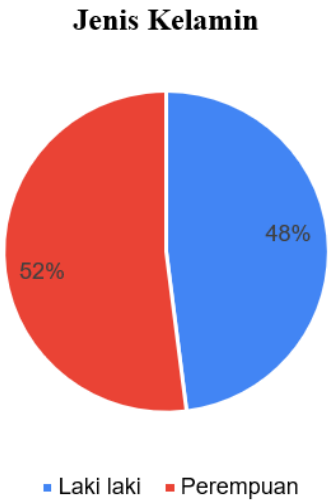

Gambar 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan gambar 1, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Pada penelitian ini responden didominasi oleh perempuan sebesar 52%, sedangkan laki-laki sebesar 48%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi responden perempuan dibandingkan responden laki-laki dalam penelitian ini. Sebagian besar responden dalam penelitian ini berada dalam rentang <20 tahun dengan persentase sebesar 42%. Selanjutnya responden yang berusia 20-29 tahun mencakup 39%, Selanjutnya responden yang berusia 30-39 tahun mencakup 11%, Sementara itu, responden yang berusia 40-49 tahun dan diatas 50 tahun masing-masing sebesar 4% dan 4%. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden penelitian berasal dari kalangan masyarakat yang berada di usia produktif awal.

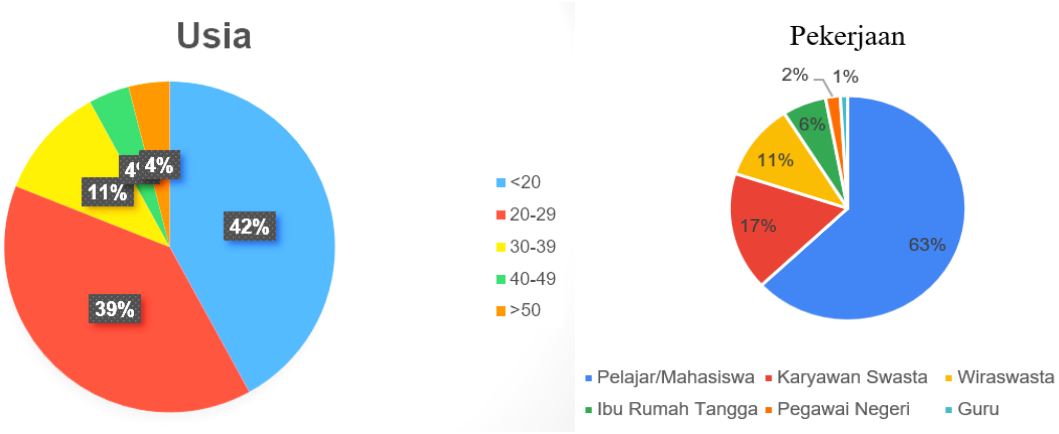

Gambar 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan Gambar 2, profil responden penelitian jika ditinjau dari jenis pekerjaan menunjukkan bahwa kelompok pelajar/mahasiswa mendominasi partisipasi responden dengan persentase sebesar 63%. Kondisi ini menandakan bahwa sebagian besar responden berasal dari kalangan usia produktif yang masih menjalani pendidikan formal serta memiliki tingkat keterlibatan yang cukup tinggi dalam mengakses informasi dan layanan publik di lingkungan kelurahan (Badan Pusat Statistik, 2022; Sugiyono, 2019).

Selanjutnya, responden yang berstatus sebagai karyawan swasta menempati urutan kedua dengan persentase 17%, kemudian disusul oleh wiraswasta sebesar 11%. Keterlibatan kelompok masyarakat yang telah aktif secara ekonomi ini mengindikasikan adanya kepedulian terhadap penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan (Dwiyanto, 2017; Mardiasmo, 2018). Adapun responden dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga tercatat sebesar 6%, pegawai negeri sebesar 2%, dan guru sebesar 1%. Walaupun jumlahnya relatif terbatas, kelompok ini tetap memiliki peran yang signifikan dalam memberikan evaluasi terhadap kualitas kinerja serta pelayanan pemerintah kelurahan, berdasarkan pengalaman langsung mereka sebagai warga yang berinteraksi dengan aparatur pemerintahan. Secara keseluruhan, distribusi responden berdasarkan jenis pekerjaan mencerminkan keberagaman kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kelurahan Kasemen. Oleh karena itu, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai persepsi masyarakat terhadap pengaruh akuntabilitas dan transparansi informasi publik dalam membangun tingkat kepercayaan Masyarakat (Mahmudi, 2015; Rahayu, 2020)**.**

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Outer Model)

Pada tahap evaluasi outer model, penelitian ini melakukan beberapa pengujian yang meliputi validitas konvergen, validitas diskriminan, *Average Variance Extracted* (AVE), *Composite Reliability*, serta *Cronbach's alpha*. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap indikator mampu mengukur konstruk yang diteliti secara tepat dan konsisten. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh setelah proses penelitian merupakan data yang valid atau tidak, berdasarkan alat ukur yang digunakan. Pengujian validitas dalam penelitian ini diukur melalui tiga kriteria, yaitu outer loading dan *Average Variance Extracted* (AVE).

Berdasarkan pengolahan data menggunakan SmartPLS, langkah awal yang dilakukan adalah menguji model pengukuran (outer model). Fokus utama analisis berada pada nilai outer loading, untuk melihat sejauh mana setiap indikator mampu menggambarkan konstruk laten yang diukur. Secara umum, indikator yang memiliki outer loading di atas 0,70 dianggap valid secara konvergen dan layak dipertahankan dalam model penelitian.

Tabel..Outer Loading Konstruk

	AP	**TIP**	**KM**
AP1	0.881		
AP2	0.788		
AP3	0.763		
AP4	0.751		
TIP1		0.707	

TIP2	0.815	
TIP3	0.840	
TIP4	0.825	
TIP5	0.844	
KM1		0.851
KM2		0.877
KM3		0.825
KM4		0.855

Jika dilihat secara keseluruhan, evaluasi outer loading menunjukkan bahwa semua indikator pada konstruk AP, TIP, dan KM telah memenuhi kriteria validitas konvergen, karena nilainya berada di atas 0,70. Hal ini menegaskan bahwa indikator-indikator yang digunakan mampu menjelaskan konstruk laten secara akurat dan konsisten, sehingga analisis penelitian dapat dilanjutkan ke tahap pengujian berikutnya.

Average Variance Extracted (AVE) digunakan untuk menilai validitas konvergen, yaitu sejauh mana suatu konstruk laten mampu menjelaskan varians indikator-indikator pengukurnya. (Chin & Dibbern, 2010) menjelaskan bahwa validitas konvergen dapat dievaluasi melalui nilai *outer loading* dan AVE, di mana AVE menunjukkan proporsi varians indikator yang dapat dijelaskan oleh konstruk laten. Kriteria AVE ≥ 0,50 mengacu pada konsep yang diperkenalkan oleh (Larcker, 1981) dan digunakan secara luas dalam penelitian berbasis PLS.

Tabel 7. Hasil Pengujian AVE

AP	TIP	KM
0.636	0.653	0.726

Uji *Discriminant Validity* bertujuan untuk mengkonfirmasi bahwa setiap indikator dapat membedakan konstruk yang diukurnya dari konstruk lainnya. (Ghozali & Latan, 2015) menyatakan bahwa *Discriminant Validity*, yang diukur dengan metode *cross-loading*, dianggap terpenuhi ketika *loading* suatu indikator pada konstruk asalnya lebih tinggi daripada *loading*-nya pada konstruk lain.

Pengujian reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi hasil pengukuran ketika karakteristik yang sama diukur berulang kali menggunakan instrumen pengukuran yang serupa. Pengujian reliabilitas proyek dilakukan berdasarkan dua kriteria: *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*.

Tabel.. Hasil Uji Realibilitas

	AP	**TIP**	**KM**
Cronbach Alpha	0.808	0.866	0.874
Composite Reliability (rho_a)	0.817	0.871	0.876
Composite Reliability (rho_c)	0.874	0.903	0.914

Pengujian reliabilitas dengan menggunakan Cronbach's Alpha dilakukan untuk melihat seberapa konsisten indikator-indikator dalam setiap konstruk ketika digunakan untuk mengukur variabel yang sama. (Ghozali & Latan, 2015) menjelaskan bahwa sebuah konstruk dapat dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha yang dihasilkan berada di atas angka 0,70. Seluruh nilai pada table..telah melewati batas minimum yang disarankan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konstruk-konstruk yang digunakan dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang memadai dan mampu menunjukkan konsistensi internal yang baik, sejalan dengan kriteria yang dikemukakan oleh (Ghozali & Latan, 2015). Uji reliabilitas dalam penelitian ini juga dilakukan dengan melihat nilai *Composite Reliability*, baik rho_a maupun rho_c, dengan ketentuan nilai yang dapat diterima adalah di atas **0,70**. Seluruh nilai *Composite Reliability* tersebut telah melampaui batas minimum yang disyaratkan, yaitu 0,70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabilitas, sehingga tidak ditemukan permasalahan reliabilitas dan model pengukuran dinyatakan layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

Hasil Pengujian Hipotesis *(Inner Model)*

Pada evaluasi inner model pada penelitian ini nanti dipaparkan tentang path coefficient serta pengujian hipotesis. Pengujian *Path Coefficient* dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen dalam sebuah model penelitian. Melalui nilai koefisien jalur, dapat diketahui tidak hanya arah hubungan antar variabel, tetapi juga seberapa kuat pengaruh tersebut. Sementara itu, koefisien determinasi digunakan sebagai gambaran sejauh mana variabel endogen mampu dijelaskan oleh variabel lain yang masuk dalam model.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan pada gambar di atas, terlihat bahwa variabel AP sebagai X1 memiliki pengaruh yang bersifat positif terhadap variabel KM sebagai Y, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,384. Di sisi lain, variabel KL sebagai X2 juga menunjukkan arah pengaruh yang sama terhadap Y, bahkan dengan nilai koefisien jalur yang lebih besar, yaitu 0,434. Jika dilihat dari perbandingan kedua nilai tersebut, pengaruh X2 terhadap Y tampak lebih kuat dibandingkan pengaruh X1 terhadap Y.

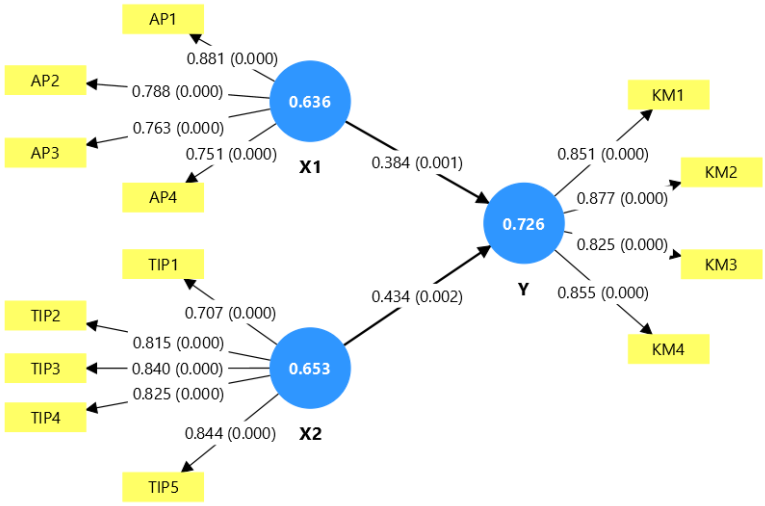

Gambar 10. Hasil Pengujian Inner Model

Temuan ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen sama-sama berkontribusi dalam memengaruhi variabel dependen. Namun, di antara keduanya, X2 dapat dikatakan sebagai variabel yang memiliki peranan lebih dominan dalam model penelitian ini dibandingkan dengan X1.

Tabel... Nilai R-square

R-square	R-square adjusted
0.591	0.583

Nilai R-square dalam suatu model umumnya dikelompokkan ke dalam tiga tingkat, yaitu kuat, sedang, dan lemah. (Al., 2011) menjelaskan bahwa nilai R-square yang berada di angka 0,75 mencerminkan kemampuan penjelasan yang kuat, nilai sekitar 0,50 menunjukkan kategori sedang, sedangkan nilai 0,25 menandakan kemampuan penjelasan yang tergolong lemah. Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada tabel, diketahui bahwa nilai R-square yang diperoleh adalah 0,591.

Angka ini menunjukkan bahwa variabel endogen dalam model penelitian memiliki tingkat penjelasan yang berada pada kategori sedang, karena nilainya telah melewati batas 0,50 namun belum mencapai 0,75. Selain itu, nilai R-square adjusted yang dihasilkan sebesar 0,583. Setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel yang digunakan dalam model, kemampuan model dalam menjelaskan variabel endogen tetap berada pada tingkat yang relatif sama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model penelitian ini memiliki daya jelas yang cukup memadai. Meskipun demikian, masih terdapat faktor-faktor lain di luar model yang berpotensi memengaruhi variabel endogen dan belum tercakup dalam penelitian ini (Al., 2011).

Tabel 12. Tabel Pengujian Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation	T statistic	P values
KL → KM	0.384	0.393	0.118	3.252	0.001
TIP →KM	0.434	0.432	0.141	3.085	0.002

Hipotesis pertama dalam penelitian ini diarahkan untuk melihat apakah akuntabilitas yang dijalankan oleh pemerintahan kelurahan benar-benar berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Hasil analisis menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS) menunjukkan adanya hubungan yang bersifat positif antara akuntabilitas pemerintahan kelurahan (KL) dan kepercayaan masyarakat (KM). Hal ini tercermin dari nilai koefisien jalur sebesar 0,384. Tidak hanya itu, pengujian signifikansi menghasilkan nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05, sehingga pengaruh tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Sofyani & Tahar, 2021) yang menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan elemen fundamental dalam menciptakan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pemerintahan kelurahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat, sehingga hipotesis pertama (H_1) dinyatakan diterima.

Hipotesis kedua difokuskan pada pengujian sejauh mana transparansi informasi publik memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Hasil pengujian model struktural, transparansi informasi publik (TIP) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,434 terhadap kepercayaan masyarakat (KM) dengan arah pengaruh positif. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi menjadi faktor yang sangat menentukan dalam membentuk persepsi dan kepercayaan publik. Uji signifikansi juga memperlihatkan nilai p-value < 0,05, yang berarti pengaruh transparansi informasi publik terhadap kepercayaan masyarakat terbukti signifikan secara statistik. Hasil ini menguatkan pandangan bahwa transparansi mampu menekan kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat, mendorong pengawasan publik, serta membangun citra positif terhadap kinerja pemerintahan kelurahan. Temuan ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa transparansi dalam administrasi publik memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat (Judijanto, 2024). Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) dapat diterima.

Hasil ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang menempatkan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam membangun legitimasi publik. (Sofyani & Tahar, 2021) menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah di tingkat desa atau kelurahan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat, karena masyarakat dapat menilai langsung bagaimana amanah dijalankan. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian (Fitrah, A., Aminah, S., & Rahayu,

2021)yang menunjukkan bahwa lemahnya sistem akuntabilitas berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik serta berkurangnya efektivitas pelayanan pemerintahan lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pemerintahan kelurahan memegang peran yang cukup strategis dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat. Praktik akuntabilitas yang konsisten tidak hanya berdampak pada meningkatnya kepercayaan, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mendukung berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah kelurahan. Temuan ini selaras dengan penelitian (Suhardi et al., 2023) yang menyatakan bahwa transparansi informasi publik berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Melalui transparansi, masyarakat memiliki dasar yang lebih objektif untuk menilai apakah pemerintah bekerja secara jujur dan berorientasi pada kepentingan publik. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan (Judijanto, L., 2024)yang menegaskan bahwa keterbukaan dalam administrasi publik berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat, terutama melalui peningkatan partisipasi dan kontrol sosial.

Dengan demikian, transparansi informasi publik dapat dipandang sebagai salah satu kunci utama dalam membangun hubungan yang sehat antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Semakin terbuka pemerintah dalam menyampaikan informasi, semakin besar pula peluang tumbuhnya kepercayaan dari masyarakat. Secara konseptual, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa akuntabilitas tanpa transparansi cenderung kurang efektif dalam membangun kepercayaan publik, begitu pula transparansi tanpa akuntabilitas yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah kelurahan perlu menjalankan kedua prinsip ini secara berimbang agar mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang kredibel dan layak dipercaya.

Temuan ini sejalan dengan pendapat (Rizki & Rahmawati, 2023) yang menyatakan bahwa perpaduan antara transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap sektor pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat di Kelurahan Kasemen perlu dilakukan melalui penguatan akuntabilitas dan transparansi informasi publik secara berkelanjutan. Kedua aspek tersebut menjadi elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan kelurahan yang bersih, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pemerintahan kelurahan (AP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan

masyarakat (KM) di Kelurahan Kasemen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemerintah kelurahan dalam mempertanggungjawabkan kebijakan, kegiatan, serta pengelolaan keuangan, maka tingkat kepercayaan masyarakat cenderung meningkat. Selain itu, transparansi informasi publik (KL) juga terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat (KM). Keterbukaan pemerintah kelurahan dalam menyampaikan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik.

Daftar Pustaka

Al., H. et. (2011). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*.

Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Penduduk Indonesia*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Kota Serang. (2024). *Kecamatan Kasemen Dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kota Serang.

Chin & Dibbern. (2010). An Introduction to a Permutation Based Procedure for Multi-Group PLS Analysis. *Handbook of Partial Least Squares*.

Dwiyanto. (2017). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Fitrah, A., Aminah, S., & Rahayu, D. (2021). *PERFORMANCE ACCOUNTABILITY IN INDONESIAN LOCAL GOVERNMENTS : DOES MONITORING REALLY WORK ? 22*(3), 1673–1692.

Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali & Latan. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS*.

Israel. (1992). *Determining Sample Size*. University of Florida Cooperative Extension Service.

Judijanto, L., et al. (2024). *Analysis of the Effect of Public Administration Transparency on Public Trust in Indonesia*. *1*(02), 69–76.

Judijanto. (2024). Analysis of the Effect of Public Administration Transparency on Public Trust in Indonesia. *Journal of Public Administration*.

Larcker, F. &. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*.

Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.

OECD. (2018). *Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust*. OECD Publishing.

Rahayu. (2020). Transparansi Informasi Publik dan Kepercayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*.

Rizki & Rahmawati. (2023). Building Public Trust through Transparency and Accountability: A Systematic Review of the Role of Public Sector Accounting. *Journal of Public Sector Accounting*.

Sofyani & Tahar. (2021a). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*.

Sofyani & Tahar. (2021b). *kuntansi, vol 4 no 1, p. 10-25*. *4*(1), 10–25. https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suhardi, U. U., Pribadi, U., & Losi, Z. (2023). *The Effects of Good Governance Principles : Accountability , Transparency , and Participation on Public Trust in Village Funds Management*. *7*(4), 1050–1060.

Sulastri, N., Kurniawan, T., & Lestari, A. (2021). *AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS PELAYANAN E-KTP DI KANTOR KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR) PUBLIC SERVICE ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY (CASE STUDY OF e-KTP SERVICE IN TALLO DISTRICT OFFICE MAKASSAR*. *28*(April).

Umar. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Rajawali Pers.
UNDP. (2016). *Governance for Sustainable Development*. UNDP.